

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* merupakan suatu kondisi yang menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada Maret 2019, virus ini masih menjadi persoalan yang cukup serius bagi khalayak ramai. Hingga 4 November 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.246.802 orang terkonfirmasi positif *Covid-19* dengan jumlah kematian sebesar 143.500 (CFR: 3,4%) terkait *Covid-19* yang dilaporkan dan 4.091.938 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut (Annisa, 2021). Seiring terdeteksinya varian baru, kasus harian global *Covid-19* terus mengalami peningkatan. Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah terus berupaya dalam pengendalian penularan dengan memberikan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama.

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional,

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Dengan begitu, program PEN dapat menjadi upaya inti yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan kesehatan dan rehabilitasi ekonomi. Upaya tersebut tercermin dari cukup besarnya alokasi anggaran pada sektor kesehatan. Dalam APBN 2021, pagu anggaran pada bidang kesehatan sebesar Rp 214,95 triliun akan dialokasikan dan dimanfaatkan untuk *Testing* dan *Tracing*, biaya perawatan, insentif dan satuan kematian tenaga kesehatan, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta pengadaan vaksin. Dalam hal mewujudkan program tersebut, sektor kesehatan dapat merealisasikannya melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat, salah satunya yaitu puskesmas.

Puskesmas adalah “fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya”, Pasal 1, Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Sebagai garda terdepan, puskesmas berkewajiban untuk menjadi penyedia kesehatan yang bermutu berkesinambungan dengan selalu mempertimbangkan keselamatan pasien dan masyarakat. Demi mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diperlukan adanya sistem informasi akuntansi.

Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi pada multisektor membawa hasil berupa efisiensi dan efektivitas dalam proses keberlangsungan aktivitas operasi sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan. Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016). Dengan adanya sistem akuntansi, kewajiban perusahaan dalam hal pertanggungjawaban keuangannya akan menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi sehingga informasi keuangan akan lebih relevan bagi perusahaan. Sejalan dengan utilitas tersebut, puskesmas juga berkewajiban untuk menjalankan sistem informasi puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, sistem informasi puskesmas adalah “Suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya”. Pencatatan dan pelaporan keuangan dan kegiatan puskesmas dan jaringannya merupakan bagian dari cakupan sistem informasi puskesmas. Dengan begitu, sistem informasi puskesmas juga dapat berkontribusi dalam pengadaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan obat di puskesmas agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan target yang telah ditentukan mengingat obat adalah persediaan utama di puskesmas.

Tingkat ketersediaan obat di tingkat fasilitas pelayanan pemerintah terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke-tahun. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi tingkat ketersediaan obat berada pada tingkat persentase yang lebih tinggi dibandingkan yang ditargetkan yakni 92,47% untuk tahun 2018 dan 94,22% untuk

tahun 2019 dengan target masing-masing sebesar 86% dan 90% (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2020). Walaupun tingkat ketersediaan obat secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan yang baik, data Bappenas menginterpretasikan proses distribusi obat dan vaksin dari gudang farmasi masih perlu perhatian lebih lanjut karena beberapa jenis obat ditemukan pernah atau masih dalam keadaan kosong. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya *mismatch* yang terjadi pada sistem perencanaan dan realisasi pengadaan obat. Akibatnya, masih terjadi disparitas ketersediaan obat antar region, provinsi, dan kabupaten/kota yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Atas dasar tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan tinjauan atas pengelolaan persediaan obat di Puskesmas Jetis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi atas persediaan obat di Puskesmas Jetis dalam masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana bentuk pengendalian internal terkait persediaan di Puskesmas Jetis?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir, penulis memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem informasi akuntansi atas persediaan obat di Puskesmas Jetis pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terkait persediaan obat di Puskesmas Jetis.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan:

1. Jenis Obat yang akan diteliti adalah obat yang berfungsi untuk menangani gejala-gejala Covid-19 seperti obat demam dan obat terkait permasalahan pada sistem pernafasan.
2. Data yang digunakan sebagai dasar pembahasan atas pelaksanaan sistem informasi akuntansi persediaan obat adalah data di masa pandemi Covid-19 pada Desember 2021 sampai dengan Januari 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi siklus persediaan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan membandingkan praktik penerapannya di Puskesmas Jetis.

2. Bagi pegawai Puskesmas Jetis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan memberikan pandangan baru mengenai sistem informasi akuntansi siklus persediaan agar kedepannya pengelolaan persediaan obat dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi bahan rujukan informasi dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi siklus persediaan bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan yang masing-masing dijelaskan pada sub bab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memberikan penjelasan teori tentang topik yang disusun penulis, meliputi pengertian sistem informasi akuntansi, urgensi penerapan sistem informasi akuntansi, sistem akuntansi siklus pengeluaran dan sistem pengendalian internal atas persediaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk penyusunan KTTA ini.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode kepustakaan, metode penelitian lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada bagian gambaran umum objek penulisan, penulis akan menguraikan informasi mengenai Puskesmas Jetis, meliputi profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi Puskesmas Jetis, serta tugas dan wewenangnya. Sedangkan, pada bagian pembahasan hasil, penulis akan mengaitkan tinjauan pustaka dengan hasil observasi dan masalah-masalah yang mungkin muncul di lapangan serta memberikan penjelasan mengenai siklus pembelian persediaan obat di puskesmas dan pengendalian internal atas persediaan obat di puskesmas.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran untuk Puskesmas Jetis yang hasilnya dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah dan memperbaiki siklus persediaan obat di Puskesmas Jetis.